



## PERAN STRATEGIS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN SEKTOR PARIWISATA: ANALISIS DATA PANEL DI INDONESIA

\*Aln Pujo Priambodo<sup>1</sup>, Alfiana Yuniarianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Palu

<sup>2</sup>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta

\*Alamat Korespondensi: [aln.pujo@gmail.com](mailto:aln.pujo@gmail.com)

### Abstract

*Indonesia's tourism sector holds substantial potential for driving community-level economic development. Within this sector, the accommodation and food and beverage services are among the primary beneficiaries of government travel expenditures. Nevertheless, such expenditures are often perceived merely as operational or supporting activities with limited macroeconomic implications. Therefore, this study aims to examine the effect of government travel spending on the economy, particularly in the tourism sector. The impact is measured by using the best panel regression model among Fixed Effect, Random Effect, Pooled OLS, First Difference, Between OLS, and Fama-MacBeth models. The Between OLS estimation emerged as the best-fitting model, revealing that government travel spending significantly contributes to tourism sector growth, with an estimated increase of 0.64 points for each additional spending. Additionally, other independent variables—such as the human development index, foreign direct investment, and domestic direct investment—also positively contribute to the RGDP in the accommodation and food and beverage sector.*

### Abstrak

Sektor kepariwisataan Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Lingkup usaha pariwisata mencakup sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang kerap menjadi penerima manfaat dari belanja perjalanan dinas pemerintah. Namun, perjalanan dinas kerap dinilai sebagai kegiatan pendukung yang tidak secara langsung mendorong peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dampak dari realisasi perjalanan dinas terhadap perekonomian, terutama sektor pariwisata. Pengukuran dampak dilakukan dengan model regresi data panel yang mengakomodasi model terbaik dari Model *Fixed Effect*, *Random Effect*, *Pooled OLS*, *First Difference*, *Between OLS*, atau *Fama-MacBeth*. Hasil regresi *Between OLS Estimation* (model terbaik) menunjukkan bahwa perjalanan dinas memiliki pengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kepariwisataan, sebesar 0,64 poin untuk setiap kenaikan



realisasi belanja perjalanan dinas. Selain itu, variabel bebas lain yang terakomodasi, seperti IPM, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri turut memberikan andil positif dalam meningkatkan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

**Keywords:** Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Pariwisata, Belanja Pemerintah, Perjalanan Dinas Pemerintah, Penanaman Modal, IPM.

**JEL Classification:** R11, F21, H50

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman alam dan budaya yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Panorama alam dan sosial Indonesia memiliki potensi dalam menjadi motor penggerak perekonomian. Dalam gambaran sederhana, setiap turis, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, memiliki kebutuhan atas akomodasi/tempat tinggal, dan makan-minum sehingga secara langsung kegiatan turisme/pariwisata tersebut memiliki potensi dalam memutar perekonomian di sektor pariwisata, khususnya di subsektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum.

Bahiyah dalam Oktapiani et al. (2024) menuturkan bahwa pengembangan sektor pariwisata

memberikan dampak positif kepada masyarakat di suatu daerah dalam aspek perekonomian, sosial, dan budaya. Bahkan, perolehan devisa Indonesia didominasi oleh perolehan dari sektor pariwisata (Fairuuz et al., 2022; Rizaldi et al., 2024) yang disumbang dari wisatawan luar negeri.

Sumbangsih sektor pariwisata turut *ter-capture* dalam dimensi fiskal, yaitu dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ndjurumbaha et al., 2024). Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan pajak daerah yang dipungut berdasarkan biaya tertentu atas pembelian barang/jasa terkait usaha akomodasi dan penyediaan makan minum. Lebih lanjut, biaya yang dibebankan kepada pengunjung saat mengakses tempat wisata diakui sebagai retribusi daerah secara spesifik

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Wisatawan 2017-2023



Sumber: BPS (diolah peneliti)

dicatat dalam akun "Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga".

Potensi pengembangan sektor pariwisata dapat terlihat dari wisatawan yang datang di Indonesia. Berdasarkan catatan BPS, data wisatawan memiliki tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dengan rerata peningkatan sebesar 27,46% (yoy), walaupun terdapat penurunan pada masa pandemi COVID-19. Jumlah wisatawan pada tahun 2023 mencapai 837,48 juta jiwa yang terdiri dari 11,68 ribu jiwa pelancong mancanegara dan sisanya merupakan wisatawan lokal (Grafik 1). Capaian wisatawan luar negeri tersebut telah melampaui target tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dewi, 2023) dan menyumbang kontribusi terhadap devisa negara sekitar US\$4,26 miliar (Hasibuan et al., 2023).

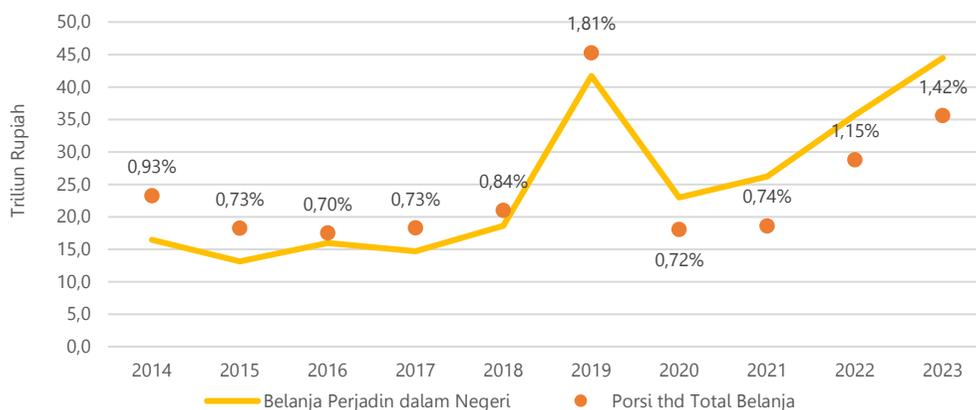
Selain wisatawan luar negeri, wisatawan nusantara juga memiliki peran dalam membangun sektor pariwisata. Beberapa penelitian, seperti dilakukan oleh Fadhila (2019) dan

Purnama et al. (2024), mengisyaratkan bahwa wisatawan lokal memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun kasus di Bali menunjukkan bahwa wisatawan domestik berperan penting sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi pasca pandemi (Putra et al., 2021).

Komponen fiskal pemerintah tidak dapat dipisahkan dalam koridor ekonomi. Seluruh belanja pemerintah terhitung dalam pengukuran ekonomi sebagaimana teori ekonomi Keynesian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap uang APBN yang terealisasi dalam bentuk belanja modal, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, serta barang/jasa yang di dalamnya termasuk belanja perjalanan dinas dalam negeri memiliki sumbangsih dalam perekonomian suatu negara.

Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam rentang tahun 2014 hingga 2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada

Grafik 2 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas APBN 2014 s.d. 2023



Sumber: DJPb (diolah peneliti)

Grafik 2. Belanja perjalanan dinas dalam negeri berada di bawah 1,5% secara porsi dari total realisasi belanja APBN selama 10 tahun terakhir dengan nominal tertinggi sekitar Rp44,47 T pada tahun 2023.

Belanja perjalanan dinas merupakan salah satu komponen fiskal yang sedang menjadi fokus efisiensi pemerintah yang ditegaskan oleh Menteri Keuangan yang secara gamblang menginginkan adanya efisiensi atas perjalanan dinas pemerintah (Priotmaji, 2019). Penganggaran dan pelaksanaan belanja perjalanan dinas menjadi polemik karena dinilai tidak secara langsung mendorong ketercapaian indikator pembangunan. Walaupun secara riil, setiap pengeluaran perjalanan dinas akan masuk ke dalam (a) usaha transportasi, (b) usaha akomodasi penginapan, dan (c) usaha penyediaan makan dan minum yang mana (b) dan (c) merupakan subsektor pariwisata.

Penelitian belanja perjalanan dinas di Indonesia selama ini masih berfokus dalam dimensi rancang bangun aplikasi seperti yang diungkapkan dalam karya tulis Hendry et al. (2022a), Putra & Wahyu (2022), dan Hendry et al. (2022b). Belum ditemukannya ruang lingkup penelitian yang secara khusus mengukur dampak atas belanja perjalanan dinas pemerintah terhadap ekonomi pariwisata. Selama ini, analisis atas dampak instrumen pemerintah menggunakan variabel belanja pemerintah secara agregat dengan variabel terikat berupa perekonomian, sebagaimana dalam Hidayat & Nalle (2017). Tanjung et al. (2022) menemukan peranan belanja pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera

terhadap ekonomi dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel belanja pemerintah hanya mengakomodasi di tingkat agregat/total belanja pemerintah.

Penulis berusaha mengungkap bagaimana pengaruh belanja terkait terhadap perekonomian di Indonesia karena minimnya temuan terkait dampak belanja perjalanan dinas terhadap ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pengukuran atas dampak ekonomi yang dihasilkan atas realisasi belanja perjalanan dinas pemerintah di Indonesia. Lingkup penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2014 s.d. 2023. Indikator ekonomi yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata, khususnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, per provinsi. Penggunaan PDRB sektoral ditujukan agar pengukuran dampak dapat dilaksanakan secara tematik dan parsial, serta meminimalkan bias dalam pengambilan kesimpulan. Selain realisasi belanja perjalanan dinas APBN, karya tulis ini turut mengakomodasi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal, khususnya dalam perencanaan perjalanan dinas APBN, untuk mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia. Bukti empiris baru mengenai dampak belanja perjalanan dinas terhadap sektor

pariwisata dapat menjadi rujukan yang relevan.

## TINJAUAN LITERATUR

### PDRB Sektor Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah tertentu (Putri, 2020). PDRB umumnya digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah yang kemudian menjadi dasar dalam pengukuran perkembangan ekonomi regional dalam satu jangka waktu, biasanya satu tahun. Sebagai cerminan tingkat produksi suatu daerah, PDRB, khususnya Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), digunakan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan usaha maupun tata cara aktivitas perekonomian.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022) memberikan *guideline* atau panduan atas indikator perekonomian di bidang pariwisata. Melalui pendekatan tersebut, pengukuran ekonomi kepariwisataan dalam karya tulis ini mencakup nilai barang dan jasa yang berasal dari aktivitas penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan layanan makan dan minum. Selanjutnya, untuk menilai pengaruh secara riil atas variabel-variabel bebas, indikator ekonomi akan mengacu pada harga konstan sehingga setiap peningkatannya langsung mewakili pertumbuhan perekonomian.

### Perjalanan Dinas

Berdasarkan wilayah tujuannya, perjalanan dinas terbagi menjadi dua, yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan

luar negeri. Pengaturan terkait perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2023 untuk perjalanan dinas dalam negeri, sedangkan perjalanan dinas luar negeri diatur dengan PMK Nomor 181/PMK.05/2019.

Menurut pengertiannya, perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, sedangkan perjalanan dinas luar negeri dilakukan ke luar tempat kedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam pencapaian kinerja yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan anggaran belanja negara dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Jenis perjalanan dinas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perjalanan dinas dalam negeri yang pendanaannya bersumber dari dana APBN. Hal tersebut didasari oleh pengukuran PDRB yang mengagregasi output atas barang/jasa yang produksi dalam suatu daerah/*region* dalam satu waktu.

### IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran yang digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia di suatu negara atau wilayah. IPM menjadi salah satu target indikator pembangunan daerah di samping pertumbuhan ekonomi (Mongan, 2019). Pembangunan kesejahteraan manusia tercatat dalam pengukuran IPM yang

dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama kesejahteraan manusia, yaitu melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kualitas hidup manusia yang lebih baik. IPM yang tinggi menunjukkan kualitas pemenuhan kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, serta pemenuhan kebutuhan primer lainnya (Setiawan & Ariani, 2022) sehingga mencerminkan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik. Kelompok dengan IPM tinggi pada dasarnya memiliki kecenderungan pengeluaran yang lebih beragam dan tidak hanya terfokus untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa alokasi belanja akan semakin besar dapat menysasar barang/jasa tersier, termasuk belanja untuk berlibur, penyewaan hotel, dan pembelian makan dan minum di restoran.

### **Penanaman Modal**

Penanaman modal merupakan aktivitas ekonomi dalam rangka membentuk kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan, dan memperluas lapangan pekerjaan (Jamil & Hayati, 2021) dengan penyuntikan sejumlah modal dalam proses ekspansi bisnis.

Jenis penanaman modal di Indonesia dikenal secara umum dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Secara ringkas, PMA adalah kegiatan investor luar negeri atau warga negara asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Sementara itu, PMDN mencakup penanaman modal yang dilakukan oleh

investor dalam negeri ke dalam usaha di dalam negeri.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penanaman modal asing dan dalam negeri memiliki signifikansi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian (Adi & Syahlina, 2020; Rumulutur et al., 2022). Adapun penanaman modal dari luar negeri juga banyak membawa pengaruh yang positif, antara lain meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan (Rosmayanti & Apriani, 2023). Jika ditarik dalam kontekstual penelitian ini, peningkatan penanaman modal akan berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata, salah satunya yaitu memungkinkan adanya pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung pengembangan destinasi baru, baik di bidang perhotelan, transportasi, makanan dan minuman, hingga fasilitas wisata.

### **Penelitian Terdahulu**

Secara spesifik dan tematik, belum terdapat penelitian yang membahas dampak mengenai belanja perjalanan dinas pemerintah terhadap perekonomian, khususnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mewakili ekonomi kepariwisataan. Lingkup penelitian terkait perjalanan dinas hanya menyentuh di dalam lingkup rancang bangun aplikasi (Hendry et al., 2022), efisiensi biaya (Mahyudin, 2024), dan belum mengukur dampak riil terhadap perekonomian.

Kajian terdahulu banyak membahas mengenai dampak dari variabel belanja pemerintah secara agregat. Penelitian

Rambe & Febriani (2020); Pangestu (2019); dan Hidayat & Nalle (2017) menemukan bahwa belanja pemerintah memiliki peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah juga disebutkan mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang lebih tinggi. Namun, penelitian Jeje (2021) dengan metode regresi untuk 150 negara menemukan bahwa belanja pemerintah belum dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Studi di lingkup internasional juga turut dilakukan oleh Nguyen (2023) yang menjelaskan determinansi indikator kepariwisataan atas kinerja pemerintah dari segi pemerintahan, kualitas pelayanan, independensi politik, dan kredibilitas yang terangkum dalam indeks efektivitas pemerintahan.

Penelitian ini mengadopsi beberapa penelitian terdahulu terkait pengujian kausalitas belanja pemerintah terhadap perekonomian, hipotesis dalam penelitian ini adalah belanja perjalanan dinas APBN, sebagai bagian di dalam belanja pemerintah, akan mendorong perekonomian, khususnya di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode statistik regresi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data observasi mencakup 34 provinsi dari tahun 2014 hingga 2023. Pengukuran dampak atas variabel bebas (realisasi belanja perjalanan dinas, IPM, PMA, dan PMDN) terhadap variabel terikat (PDRB sektor pariwisata) menggunakan model regresi data panel dengan bantuan

*Jupyter Lab*. Penggunaan model regresi dalam mengungkap dampak variabel bebas didasarkan kepada sejumlah penelitian terdahulu seperti Gavurova et al. (2020), dan Jeje (2021). Secara spesifik, Septianingsih (2022), dan Tanjung et al. (2022) menganalisis dampak satu variabel terhadap variabel yang lain dengan karakteristik data antar-entitas (*cross section*) dan berentang waktu (*time series*) dengan menggunakan pendekatan regresi data panel.

Model regresi data panel dalam penelitian akan menggunakan model regresi *Fixed Effect*, *Random Effect*, *Pooled OLS*, *First Difference*, *Between Estimation*, dan *Fama-MacBeth Estimation*. Berdasarkan model-model tersebut, akan dipilih satu model terbaik dalam pengukuran dampak variabel bebas yang didasarkan kepada indikator seperti tingkat determinan

atau *R-squared* (Rights & Sterba, 2020), *Akaike Information Criterion (AIC)* (Brown & Simcock, 2022), atau *Bayesian Information Criterion (BIC)* (Dziak et al., 2020).

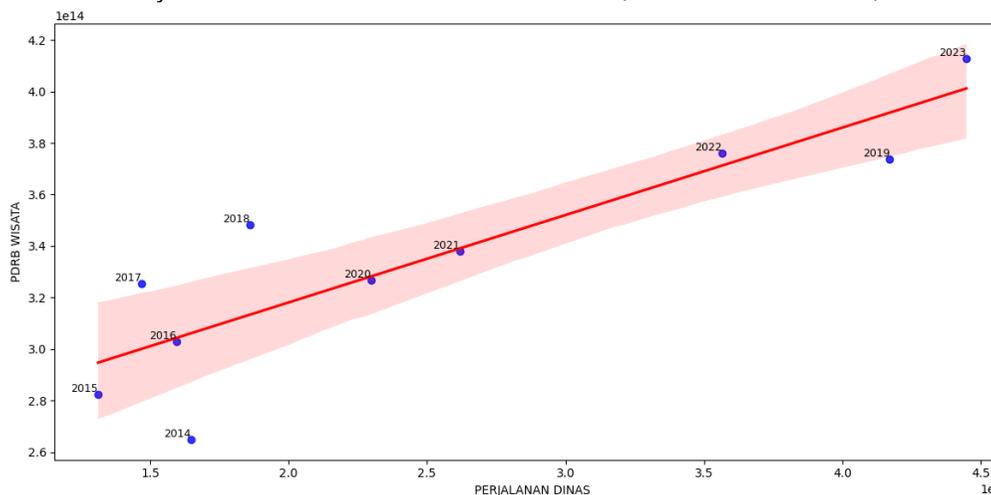
Analisis statistik deskriptif juga digunakan untuk membedah informasi dari data yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah pemahaman dan menelisik hubungan secara umum atas variabel dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

Dari analisis deskriptif dalam Tabel 1, penelitian ini mengakomodir sekitar 340 data observasi yang menunjukkan

Grafik 3 Hubungan Realisasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Tahun 2014 s.d. 2023)



Sumber: Diolah peneliti

rerata belanja perjalanan dinas di angka Rp734,86 M dan rata-rata PDRB Pariwisata di sekitar Rp9,85 triliun. Nilai tertinggi PDRB Pariwisata adalah sebesar Rp101,73 triliun yang tercatat di Jawa Timur berdasarkan periode pencacahan tahun 2023. Sementara itu, nilai belanja perjalanan dinas tertinggi terealisasi di daerah DKI Jakarta pada tahun 2023 dengan nominal sebesar Rp24,12 miliar. PDRB Pariwisata konstan terkecil tercatat di Sulawesi Barat pada tahun 2014 dan realisasi belanja perjalanan dinas terkecil berada di Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran 2014 dilihat dari segi minimum.

Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki kecenderungan untuk tumbuh positif dilihat dari perspektif tahunan. Ekonomi kepariwisataan yang diwakili oleh Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Indonesia dalam 10 tahun terakhir berhasil tumbuh sebesar 55,87%, menjadi sebesar Rp412,62 T pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi tercatat atas

komponen penanaman modal dalam negeri yang mencapai 332,29% dari tahun 2014 (Tabel 2).

Realisasi belanja perjalanan dinas dan PDRB Pariwisata ADHK menunjukkan adanya hubungan yang positif atau searah. Dalam Grafik 3, persebaran data menggunakan *scatter plot* menunjukkan kecenderungan tingginya PDRB Pariwisata ketika realisasi belanja perjalanan dinas tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi belanja perjalanan dinas, semakin tinggi pula PDRB pariwisata. Lebih lanjut, korelasi positif yang signifikan antara belanja perjalanan dinas dengan nilai PDRB Pariwisata ditunjukkan lewat kalkulasi korelasi pearson di angka 0,88 (Grafik 4). Hal tersebut mengindikasikan adanya peran dari belanja perjalanan dinas pemerintah dalam pembangunan ekonomi kepariwisataan yang perlu diuji lebih lanjut untuk menilai kuantitas dampaknya.

### Pemilihan Model Terbaik

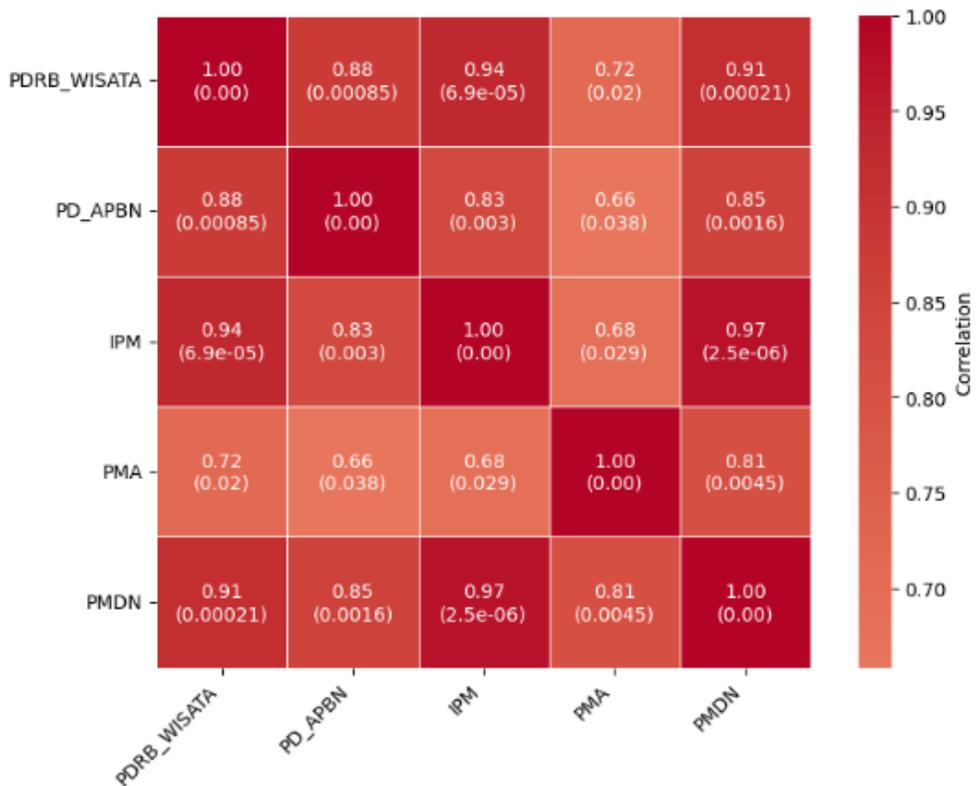
Secara umum, formulasi matematis dalam penelitian ini dimodelkan sebagai berikut:

$$\ln(\text{PDRB\_Wisata}_{ij}) = c + \beta_1 \cdot \ln(\text{PD\_APBN}_{ij}) + \beta_2 \cdot \ln(\text{PMA}_{ij}) + \beta_3 \cdot \ln(\text{PMDN}_{ij}) + \beta_3 \cdot \text{IPM}_{ij} \dots (1)$$

dimana:

- PDRB\_Wisata merupakan Produk Domestik Regional Bruto ADHK khusus untuk Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mewakili ekonomi industri kepariwisataan dalam satuan Rupiah;
- PD\_APBN mewakili realisasi belanja perjalanan dinas yang berasal dari dana APBN dalam satuan Rupiah.
- Penanaman Modal Asing (PMA) adalah nilai investasi langsung dari pihak asing ke dalam lapangan di Indonesia dalam satuan dolar amerika (US\$).
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan nilai penanaman modal dari dalam negeri dalam satuan Rupiah.
- IPM merupakan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan pendekatan atas kesejahteraan manusia di suatu wilayah;
- $\ln()$  merepresentasikan fungsi logaritma natural yang digunakan

Grafik 4 *Heatmap* Korelasi Person antar Variabel



Sumber: Diolah peneliti

untuk mentransformasikan data sehingga lebih terstandarisasi;

- $\alpha$  merupakan penanda provinsi dan waktu;
- $\beta$  merupakan koefisien atau bobot dampak atas variabel bebas terhadap variabel terikat; dan
- $c$  mewakili nilai konstan.

Selanjutnya, uji pemilihan model dilaksanakan dengan hasil sebagaimana Tabel 3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik dalam regresi data panel merujuk ke model *Between* OLS. Model tersebut dipilih berdasarkan hasil *R-squared* tertinggi (72,29%), dan rendahnya nilai absolut AIC (97,08) serta nilai absolut BIC (104,71) dibandingkan dengan model lainnya.

**Hasil Regresi *Between* OLS**

Model regresi terpilih digunakan untuk menganalisis data dari 34 Provinsi selama 10 Tahun. Hasil analisis dapat diformulasikan dalam konotasi matematis sebagai berikut:

$$\ln(\text{PDRB\_Wisata}) = -10,05 + 0,64*\ln(\text{PD\_APBN}) + 0,15*\ln(\text{PMA}) + 0,28*\ln(\text{PMDN}) + 0,15*IPM \dots (2)$$

Model *Between* OLS menunjukkan bahwa variabel belanja perjalanan dinas APBN, PMA, PMDN, dan IPM mampu menjelaskan sekitar 72,29% atas perubahan PDRB Pariwisata. Tabel 4 mengisyaratkan bahwa model secara simultan memiliki dampak signifikan [ $P(\text{F-Stat.}) < 0,05$ ] dalam memengaruhi ekonomi kepariwisataan di Indonesia. Secara parsial, hasil regresi turut menunjukkan bahwa variabel belanja perjalanan dinas APBN, dan IPM memiliki nilai probabilitas t-stat di bawah alpha signifikansi sehingga dapat dikatakan signifikan secara individual.

Dalam penelitian ini, regresi menggunakan *robust covariance*

Tabel 3 *Information Criterion* Regresi Data Panel

<b>FEM</b>	
Cov. Est.	Robust
R-squared	0,7171
F-statistic	191,36
AIC	-737,94
BIC	-718,80
<b>REM</b>	
Cov. Est.	Robust
R-squared	0,6731
F-statistic	172,44
AIC	-656,45
BIC	-637,31
<b>FirstDiff</b>	
Cov. Est.	Robust
R-squared	0,5249
F-statistic	83.398
AIC	-761,18
BIC	-746,29
<b>Between</b>	
Cov. Est.	Robust
R-squared	0,7279
F-statistic	19.394
AIC	97,08
BIC	104,71
<b>OLS</b>	
Cov. Est.	Robust
R-squared	0,6043
F-statistic	127,91
AIC	1.010,92
BIC	1.030,06
<b>FAMA</b>	
Cov. Est.	Fama-MacBeth Standard Cov
R-squared	0,2476
F-statistic	27.560
AIC	1.229,42
BIC	1.248,56

Sumber: Diolah peneliti

*estimator*. Tujuannya adalah untuk menangani gejala heteroskedastisitas dalam menghasilkan model regresi yang lebih relevan dan *reliable*. Proses uji heteroskedastisitas dapat dikecualikan dengan pengaplikasian *robust estimator*, (Pötscher & Preinerstorfer, 2023) untuk penelitian ini.

Lebih lanjut, deteksi multikolinieritas perlu dilakukan sebagai satu sarana uji asumsi klasik yang perlu

Tabel 4 Hasil Regresi *Between OLS Estimator*

Dep. Var:	ln_PDRB_WISATA	R-squared:	0.7279
Cov. Estimator:	Robust	Log-likelihood	-43.541
Entities:	34	F-statistic (robust):	12.769
Time periods:	10	P-value	0.0000
F-statistic:	19.394		
P-value	0.0000		

Parameter Estimates			
	Parameter	Std. Err.	T-stat (Prob.)
const	-10.045	77.962	-12.884 (0.2078)
ln_PD_APBN	0.6446	0.3014	21.385 (0.0410)
ln_PMA	0.1493	0.1731	0.8627 (0.3954)
ln_PMDN	0.2815	0.1578	17.841 (0.0849)
IPM	0.1492	0.0454	32.837 (0.0027)

Sumber: Diolah peneliti

dipenuhi dalam regresi data panel (Septianingsih, 2022). Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan VIF (*Variance Inflation Factors*). Pada Tabel 5 hasil menunjukkan bahwa model tidak terjangkit multikolinieritas yang dilihat dari nilai VIF di bawah 10.

Tabel 5 Hasil Kalkulasi VIF untuk  
Deteksi Multikolinieritas

Variabel	VIF
const	707.673152
ln_PD_APBN	1.460137
ln_PMA	1.401221
ln_PMDN	1.332827
IPM	1.271901

Sumber: Diolah peneliti

Penggunaan *robust covariance estimator* dan hasil kalkulasi VIF mengisyaratkan bahwa *Between OLS* yang digunakan dalam penelitian ini lolos dalam uji asumsi klasik sehingga model penelitian dapat dikatakan layak dan andal dalam menjelaskan PDRB pariwisata.

### Temuan Dampak Variabel Belanja Perjalanan Dinas, PMA, PMDN, dan IPM terhadap PDRD Pariwisata

Temuan dampak variabel bebas terhadap ekonomi pariwisata berdasarkan hasil analisis regresi linier sebagaimana disajikan pada Tabel 4 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Perjalanan dinas dari APBN memiliki dampak signifikan dalam menumbuhkan pertumbuhan PDRB wisata sebesar 0,6446 poin atau sekitar 1,91 rupiah untuk setiap rupiah realisasinya.
- Koefisien variabel PMA menunjukkan efek positif di angka 0,1493 poin namun tidak signifikan [ $P(t\text{-stat}) > 0,05$ ]. Dalam hal ini, bukti empiris dinilai kurang kuat untuk menyatakan bahwa peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB wisata.

- Sebagaimana PMA, realisasi PMDN tidak secara signifikan [ $P(t\text{-stat}) > 0,05$ ] berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata berdasarkan model ini.
- Setiap peningkatan IPM akan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 0,149 rupiah. Artinya, peningkatan kualitas hidup masyarakat—seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli—akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata.

Tabel 6 Koefisien Parameter Regresi  
*Between OLS*

Parameter	Ln	Re-transformed
const	-10,045	0,0000
PD_APBN	0,6446	1,9052
PMA	0,1493	1,1610
PMDN	0,2815	1,3251
IPM		0,1492

Sumber: Diolah peneliti

## KESIMPULAN DAN SARAN

Wisatawan domestik dan mancanegara memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, khususnya pada sektor pariwisata. Tingkat pengeluaran wisatawan umumnya sejalan dengan pencapaian ekonomi pariwisata. Termasuk dalam hal ini adalah belanja perjalanan dinas pemerintah, yang sebagian besar terserap pada usaha akomodasi serta makanan dan minuman.

Dampak belanja perjalanan dinas diukur melalui regresi data panel menggunakan model *Between OLS*. Hasil menunjukkan bahwa belanja perjalanan dinas bersama dengan PMA, PMDN, dan IPM secara simultan berdampak signifikan dalam meningkatkan PDRB di sektor

akomodasi dan makan minum. Kontribusi belanja perjalanan dinas diperkirakan sebesar 0,645 poin untuk setiap kenaikan 1 poin realisasi perjalanan dinas. Disamping itu, PMA memiliki pengaruh sebesar 0,149 poin terhadap perekonomian pariwisata, sementara PMDN meningkatkan PDRB hingga 0,282 poin. Indikator IPM juga berkontribusi sebesar 0,149 poin terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata.

Berdasarkan analisis, perjalanan dinas pemerintah terbukti secara empiris mampu meningkatkan *output* ekonomi di sektor pariwisata. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses penganggaran dan pelaksanaannya. Peningkatan ekonomi akomodasi dan makanan-minuman melalui realisasi perjalanan dinas harus menghindari tumpang tindih dengan sektor swasta menghindari daerah pariwisata yang sudah terlalu padat oleh kegiatan masyarakat/swasta. Perjalanan dinas pemerintah sebaiknya diarahkan ke lokasi/daerah yang masih berkembang. Tujuannya adalah agar belanja perjalanan dinas pemerintah dapat menghadirkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan adanya *cash inflow* kepada pelaku bisnis yang sedang berkembang.

Selanjutnya, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan sehubungan dengan kegiatan penanaman modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PMA dan PMDN memiliki efek terhadap perekonomian di sektor pariwisata walaupun dampaknya belum terbukti signifikan secara statistik. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata dapat

memengaruhi pengembangan infrastruktur, atraksi, layanan, serta promosi pariwisata. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, sehingga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Penguatan kualitas hidup manusia juga perlu diakselerasi. Selain karena dampaknya secara perekonomian sektoral, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga merupakan target pembangunan nasional yang sangat krusial dalam memengaruhi keberlangsungan negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan belanja modal yang menysasar padat karya, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk kemudian dibelanjakan pada kebutuhan tersier, salah satunya yaitu sektor pariwisata.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi atas penelitian ini adalah (1) analisis ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan daerah tujuan; (2) dapat menjadi dokumen referensi dalam perumusan kebijakan dalam rangka efektivitas penggunaan belanja perjalanan dinas untuk intervensi perekonomian pariwisata; (3) dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai belanja perjalanan dinas.

Keterbatasan dalam analisis ini adalah belum terhitungnya realisasi

perjalanan dinas dalam negeri dalam kelolaan pemerintah daerah. Kombinasi variabel belanja perjalanan dinas APBN dan perjalanan dinas APBD akan menghasilkan penelitian yang lebih representatif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih *prudent* dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan penganggaran belanja perjalanan dinas.

## REFERENSI

- Adi, H. A., & Syahlina, S. (2020). Analisis: Pengaruh penanaman modal luar negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 45-57.
- Brown, S., & Simcock, D. C. (2022). On the use of the Akaike information criterion to identify the 'best' model. *Deviot Institute Working Papers*.
- Dewi, N. A. (2023). Strategi branding pariwisata Indonesia melalui Wonderful Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*, 1(1), 161-168.
- Dziak, J. J., Coffman, D. L., Lanza, S. T., Li, R., & Jermiin, L. S. (2020). Sensitivity and specificity of information criteria. *Briefings in Bioinformatics*, 21(2), 553-565.
- Fadhila, R. S. (2019). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, lama menginap wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 21-32.

- Fairuuz, N., Nofrian, F., & Desmintari, D. (2022). Peranan jumlah wisatawan asing, nilai tukar, dan PMDN dalam sektor pariwisata terhadap pendapatan devisa pariwisata Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(04), 694–707.
- Gavurova, B., Ivankova, V., Rigelsky, M., & Přivarová, M. (2020). Relations between tourism spending and global competitiveness – An empirical study in Developed OECD Countries. *Journal of Tourism and Services*, 11(21), 38–54.
- Hasibuan, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1200-1217.
- Hendry, Putra, E., Zen, M., Supiyandi, & Rizal, C. (2022a). Perancangan aplikasi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) responsive with Bootstrap Berbasis Web. *Bulletin of Computer Science Research*, 3(1), 1–6.
- Hendry, Putra, E., Zen, M., Supiyandi, & Rizal, C. (2022b). Perancangan aplikasi surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas berbasis web. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis pengaruh belanja pemerintah, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71-86.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2021). Pasar modal dan penanaman modal asing di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 477–484.
- Jeje, K. (2021). Increasing tourist arrivals: Do capital investment and government spending matter? *The Journal of Accounting and Management*, 11(1), 122-133.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Cakupan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Mahyudin, A. R. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas standar harga perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. *Jl@P: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Ndjurumbaha, V. Y. L., Tiwu, M. I. H., & Ballo, F. W. (2024). Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 46–55.
- Nguyen, C. P. (2023). Do institutions matter for tourism spending? *Tourism Economics*, 29(1), 248–281.
- Oktapiani, M. A., Prakoso, L. Y., & Suwito Suwito. (2024). Tourism potential development strategy using the military model to improve local

- economic development in Indonesia. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(6).
- Pangestu, E. C. (2019). Pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1).
- Pötscher, B. M., & Preinerstorfer, D. (2023). Valid heteroskedasticity robust testing. *Econometric Theory*, 1–53.
- Prioatmaji, D. (2019). Peningkatan efisiensi belanja perjalanan dinas pada kementerian/lembaga dengan model shared services. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(1), 71–86.
- Purnama, R., S., K. D. A., & Wibowo, A. (2024). Analisis pengaruh sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kawasan destinasi super prioritas. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(9), 669–678.
- Putra, G. G. R., & Wahyu, A. P. (2022). Perancangan aplikasi perjalanan dinas online Yayasan Pendidikan Telkom. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 8(2).
- Putra, M. S. P., Yustiani, D., & Astawa, I. N. D. (2021). Wisatawan nusantara sebagai pengungkit ekonomi bali di era pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 12(1).
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh pariwisata terhadap peningkatan PDRB Kota Surakarta. *Cakra Wisata*, 21(1).
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2020). Peran belanja pemerintah dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 57–76.
- Rights, J. D., & Sterba, S. K. (2020). New recommendations on the use of R-Squared differences in multilevel model comparisons. *Multivariate Behavioral Research*, 55(4), 568–599.
- Rizaldi, A. S., Rumanti, A. A., & Andrawina, L. (2024). Sustainable tourism industry in Indonesia through mapping natural tourism potential: Taxonomy Approach. *Sustainability*, 16(10), 4201.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1).
- Rumalutur, T., Kasmando, H. R., Marlissa, E. R., & Siahainenia, J. E. H. (2022). Pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 6(3).
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan data panel menggunakan random effect model untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup di Indonesia. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan*

*Matematika, Matematika dan Statistika*, 3(3), 525–536.

Setiawan, A. W., & Ariani, M. B. N. (2022).

Determinasi faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 1–9.

Tanjung, A. A., Syafii, M., Tarigan, S. B., & Harahap, W. G. (2022). Analisis pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Model data panel. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 567–575.